



**PENGARUH KOMPETENSI, AKUNTABILITAS, PENGENDALIAN
INTERNAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
KEBONAGUNG MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Ratieh Aldela Megaayu Istiqomah

NPM. 21901082110



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa kebonagung malang. Indikator variabel independen penelitian ini adalah Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat. Indikator variabel dependen penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari kantor Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang terletak di Jl. Raya Kebonagung No 124, Sonosari, Kebonagung, Jawa Timur 65162. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Aparatur atau perangkat desa Kebonagung Malang berjumlah 15 orang, Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berjumlah 15 orang, dan jumlah Pamong Praja berjumlah 10 orang. Sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 40 kuesioner, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 kuesioner. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to explain the influence of competence, accountability, internal control and community participation on the effectiveness of managing funds in the village of Kebonagung Malang. The independent variable indicators of this study are Competence, Accountability, Internal Control, Community Participation. The dependent variable indicator of this research is Village Fund Management. The data used are primary data, obtained from the Kebonagung Village office, Pakisaji District, Malang Regency, which is located on Jl. Raya Kebonagung No 124, Sonosari, Kebonagung, East Java 65162. Sampling was carried out using purposive sampling method. Kebonagung Malang village apparatus or apparatus numbered 15 people, the number of Village Consultative Councils (BPD) and Village Community Empowerment Institutions (LPMD) numbered 15 people, and the number of civil servants amounted to 10 people. So that the number of questionnaires distributed was 40 questionnaires, and the number of questionnaires that could be processed was 40 questionnaires. Data analysis used the classical assumption test and multiple linear regression. The results of this study indicate that simultaneously the variables of competence, accountability, internal control and community participation have a significant effect on the effectiveness of managing village funds. Based on the results of partial testing, the competency, accountability, internal control and community participation variables have a positive and significant effect on the effectiveness of managing village funds.

Keywords: *Competence, Accountability, Internal Control, Community Participation, Effectiveness of Village Fund Management*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di negara ini kian berkembang karena diadakannya pelaksana otonomi daerah dengan lebih memfokuskan pada pemerintah daerah sehingga mendorong seluruh tingkatan pemerintah baik ditingkat provinsi hingga tingkat desa. Akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Mulai dari tata kelola keuangan pemerintah pusat, tata kelola pemerintah daerah, bahkan tata kelola pemerintah desa. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini mengutamakan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan proses ini adalah dengan mendanai desa. Pendanaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Indonesia untuk secara mandiri melakukan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, keuangan desa tersebut diharapkan agar dapat dikelola dengan

baik dan jujur oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan sendiri oleh pemerintah desa terkait. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan pengelolaan atas dana yang diterima dan yang dikeluarkan. Pemerintah desa haruslah memiliki kecakapan, keterampilan dan kemampuan yang disebut dengan kompetensi. Dalam konteks sumber daya manusia, kompetensi mengacu pada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi juga merupakan kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Kompetensi sangat penting bagi organisasi publik ataupun privat untuk menjawab tuntutan organisasi. Aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah kualitas dari aparatur desa itu sendiri harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi, kompetensi dari aparatur desa haruslah mumpuni sehingga diharapkan bisa mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan

yang berlaku. Kompetensi yang minim memungkinkan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sebagai contoh di Desa Kebonagung kualitas sumber daya manusia secara umum sangat terbatas, kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas yang secara umum diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas yang benar dan terstruktur akan menciptakan tata kelola pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Bagi pemerintah, akuntabilitas sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Maka dari itu akuntabilitas menjadi kontrol aparatur atas segala sesuatu yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan. Kemudian, pengendalian internal suatu pemerintah desa juga turut mempengaruhi pengelolaan dana desa tersebut.

Pengendalian internal adalah faktor penting untuk pemerintahan desa dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Dengan adanya pengendalian internal dapat diketahui suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat desa.

Dalam menentukan baik buruknya kualitas pengelolaan dana desa dapat ditinjau dengan partisipasi masyarakat, karena dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dapat mengetahui sejauh mana kebijakan keuangan desa yang berlaku sehingga pengambilan keputusan tidak bergantung pada pemerintah. Partisipasi ialah keterlibatan seseorang dalam melakukan kegiatan atau melaksanakan sebuah program kerja (keikutsertaan) baik secara mental, emosi atau pikiran. Partisipasi bisa dilakukan dengan cara menyumbangkan dana, waktu dan ide kreatif demi kemajuan bersama serta dapat menikmati hasil pembangunan yang dibangun di desa. Dengan demikian seluruh masyarakat diharapkan bersedia ikut andil dalam pengelolaan dana desa dan pembuatan kebijakan atau peraturan agar terciptanya keharmonisan serta melahirkan pemerintah yang bertanggungjawab akan tugasnya dan mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan.

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini ialah Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Desa tersebut adalah yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Berikut merupakan data realisasi APBDes Desa Kebonagung tahun 2020 – 2022.

Tabel 1. 1 Ringkasan Dana APBDes Desa Kebonagung

Keterangan	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 360.000,000	Rp. 360.000,000	Rp. 360.000,000
Dana Desa (DD)	Rp. 1.000,350,000	Rp. 1.041,417,000-	Rp. 1.095.728.000
Bagi Hasil Pajak (PBH)	Rp. 162.478,300	Rp. 162.478,396	RP. 162.478.398
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 513.796,000	Rp. 513.796,000	Rp. 513.796.000

Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-

Sumber: Realisasi APBDes Desa Kebonagung 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kebonagung selama 3 tahun adalah Rp. 360.000,000, Dana Desa (DD) pada tahun 2020 Rp. 1.000,350,000, pada tahun 2021 Rp. 1.041,417,000 dan pada tahun 2022 Rp. 1.095.728.000. Jika dilihat dari tabel ringkasan dana APBDes tersebut, Desa Kebonagung sangat bergantung kepada dana pemerintah pusat yang sangat tinggi. Dengan hasil yang ditunjukkan pada Dana Desa (DD) yang melonjak tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan terlihat jelas bahwa setiap tahunnya Dana Desa (DD) selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya kemampuan untuk mengelola dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan desa yang tetap dari tahun ketahun.

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) dengan judul pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo), membuktikan kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi

aparatur dan partisipasi masyarakat maka semakin tinggi tanggung jawab dan pengelolaan dana desa dan semakin akuntabel. Hal itu selaras dengan penelitian Aryani dan Werastuti (2020). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh Kumalasari dan Widajantie (2022), dengan judul pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa Kabalandonno. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, efektivitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen dan desa Kebonagung menjadi objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas efektivitas pengelolaan dana desa dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang?
4. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam mata kuliah akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai pengaplikasian teori akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik yang diperoleh selama di perkuliahan dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak dalam bidang yang terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah Desa

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang ada dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, agar program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat desa Kebonagung Malang dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa melalui peningkatan kompetensi aparatur desa, akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif serta melibatkan partisipasi masyarakat.

d. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan minat mahasiswa program studi akuntansi berkarir

sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam bidangnya.
Juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa
lulusan akuntansi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana desa yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini:

Masruhin dan Kaukab (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)” dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan) dan Unsur Kepala Urusan pada 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menunjukkan hasil variabel dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, sehingga akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Aryani dan Werastuti (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa” dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam

penelitian ini mencakup seluruh Kepala Desa, Bendahara Desa, Pendamping Lokal Desa dan Pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di 29 desa yang berada di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng, sehingga kegiatan pengelolaan dana desa akan semakin optimal dan tepat sasaran.

Pratiwi dan Dewi (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”. dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di 36 desa yang berada di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa agar terjalannya hubungan baik antara masyarakat dengan aparat desa dan tercapainya akuntabilitas yang baik pula.

Juniarti dkk (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas

Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening” dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Karang Taruna di Kecamatan Labuhan Haji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan aparatur dalam melakukan pelatihan, sementara variabel partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Kumalasari dan Widajantie (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono” dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kebalandono. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa Kebalandono dikarenakan persepsi masyarakat desa Kebalandono yang lebih melihat hasil akhir sebagai hasil penilaian kinerja pemerintahan desa, tanpa memperhatikan proses dalam hal ini kompetensi dari pemerintah desa tersebut. Sedangkan variabel akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Kebalandono.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Masruhin dan Kaukab (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)	Kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, sehingga akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel.
Aryani dan Werastuti (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng, sehingga kegiatan pengelolaan dana desa akan semakin optimal dan tepat sasaran.
Pratiwi dan Dewi (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Namorambe	kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, sehingga terjalinnya hubungan baik antara

	Kabupaten Deli Serdang	masyarakat dengan aparat desa dan tercapainya akuntabilitas yang baik pula.
Juniarti, (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening	Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan aparatur dalam melakukan pelatihan, sementara partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
Kumalasari dan Widajantie (2022)	Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono	Kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa Kebalandono dikarenakan persepsi masyarakat desa Kebalandono yang lebih melihat hasil akhir sebagai hasil penilaian kinerja pemerintahan desa, tanpa memperhatikan proses dalam hal ini kompetensi dari pemerintah desa tersebut. Sedangkan akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah Desa Kebalandono

Sumber: Data yang diolah

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Kompetensi

2.2.1.1 Definisi Kompetensi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kompetensi adalah kecakapan, mengetahui, berwenang dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu. Berdasarkan pada arti etimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Sehingga kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan yang ditetapkan.

Aulia (2018) menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*abilty*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Moehariono (2014) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode waktu tertentu. Kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukan dalam kerja setiap hari.

Menurut Robbins (2016) kompetensi merupakan keterampilan atau kemampuan individu dalam menuntaskan beragam tugas pada pekerjaan

yang mana kemampuan ini ditetapkan dari dua faktor yakni kemampuan fisik dan intelektualnya. Wibowo (2012) mengatakan kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut untuk pekerjaan tersebut. Kompetensi menggambarkan apa yang dilakukan seseorang di tempat kerja, menggambarkan standar untuk setiap tingkat, dan membantu individu secara efektif memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka untuk mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja.

Dari beberapa definisi kompetensi yang disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki.

2.2.1.2 Standar Kompetensi

Penetapan standar kompetensi dalam Saputri (2021) meliputi enam kelompok kompetensi, yaitu:

- a. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian, kualitas kerja, proaktif, dan kemampuan mencari dan menggunakan informasi)
- b. Kemampuan melayani (empati, berorientasi pada pelanggan)

- c. Kemampuan memimpin (kemampuan mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan)
- d. Kemampuan mengelola (kemampuan mengembangkan orang lain, kemampuan mengarahkan, kemampuan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok)
- e. Kemampuan berpikir (berpikir analitis, berpikir konseptual, keahlian teknis/profesional/manajerial)
- f. Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi)

2.2.1.3 Karakteristik Kompetensi

Menurut Moehariono (2012) menjelaskan bahwa dalam setiap individu memiliki karakteristik kompetensi yang berbeda satu dengan lainnya. Berikut ini beberapa karakteristik kompetensi yaitu:

- a) Watak (*traits*), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespons sesuatu dengan cara tertentu.
- b) Motif (*motive*), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten diperkirakan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
- c) Bawaan (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk

mengetahui nilai (*value*) yang dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu.

- d) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu.
- e) Keterampilan atau keahlian (*skill*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2.2.1.4 Indikator Kompetensi

Menurut Thoha (2008) dalam Ilhami (2019) terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*), merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang atau pendidikan yang telah ditempuh. Pengetahuan yang dimiliki seseorang turut meningkatkan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.
2. Kemampuan (*skill*), merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.
3. Sikap (*attitude*), merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai sesuai dengan peraturan karyawan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang pendukung pencapaian tujuan organisasi,

maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.2.1.5 Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi dalam Moeheriono (2012) dikelompokkan menjadi beberapa, berikut adalah dimensi kompetensi yang terkait:

- 1) *Task skills*, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin
- 2) *Task management skill*, yaitu keterampilan mengelola serangkaian tugas yang berbeda
- 3) *Ccontigency management skill*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi masalah
- 4) *Job role environment skill*, yaitu keterampilan bekerja sama dan memelihara kenyamanan lingkungan kerja
- 5) *Transfer skill*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

2.2.1.6 Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa

Perangkat desa merupakan aparatur desa yang dibawa kepemimpinan kepala desa, perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa.

Kompetensi yang dimiliki menjadi syarat utama agar pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan maksimal. Komitmen ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang aparatur dalam mengelola

dana desa, melihat banyaknya jumlah sumber daya yang akan dikelola. Seorang aparatur harus memiliki pengetahuan, kemampuan serta sikap yang baik dalam mengelola dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah menyerahkan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa juga memerlukan persiapan, salah satunya aspek yang perlu dipersiapkan adalah SDM (Sumber Daya Manusia).

2.2.2 Akuntabilitas

2.2.2.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban untuk memberikan jawaban, yang bisa mengindikasikan hasil kinerja seseorang maupun organisasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditunjuk oleh para pihak terkait untuk memiliki hak serta wewenang dalam memberikan hasil dan tanggung jawabnya. Di dalam sektor pemerintahan, akuntabilitas merupakan suatu aspek penting dalam menjalankan tugas dalam setiap kegiatan yang di jalankannya, hal ini bertujuan untuk memperoleh suatu kepercayaan dan untuk dianggap mampu bagi masyarakat dalam setiap pengerjaan kegiatannya.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan atas aktivitas yang dilakukan.

Menurut Andangatmadja (2011) akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, serta bagian dari sanksi dan penghargaan. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban yang mempertanggungjawabkan kesuksesan ataupun keberhasilan penyelenggaraan misi organisasi guna pencapaian tujuan dan sasarannya yang sudah ditentukan, dengan media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Kumalasari dan Widajantie, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah tugas atau kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan.

2.2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain yaitu:

- a. Kepemimpinan: Pimpinan memberi contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.
- b. Transparansi: Keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya akuntabilitas.
- c. Integritas: Selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- d. Responsibilitas: Kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.
- e. Keadilan: Sikap yang harus diterapkan karena menjadi landasan utama dari akuntabilitas.
- f. Kepercayaan: Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan
- g. Keseimbangan: Keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki.
- h. Kejelasan: Mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja.
- i. Konsistensi: Menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel.

2.2.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Pratiwi dan Dewi, 2021).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip dalam *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Akuntabilitas publik termasuk dalam akuntabilitas finansial dimana akuntabilitas ini merupakan sebuah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik dalam menjalankan kegiatannya. Akuntabilitas ini menjelaskan bagaimana seseorang atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya dapat menggunakan dana yang dipakai secara efektif dan efisien serta tidak menggunakannya untuk hal yang tidak penting.

menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan, dikarenakan melalui terdapatnya akuntabilitas terhadap masyarakat, warga atau masyarakat tidak sekadar memahami anggaran namun pula penyelenggaraan aktivitas yang dianggarkan maka perangkat desa berupaya secara baik dalam melakukan semua rencana yang ada dikarenakan akan dievaluasi dan dilakukan pengawasan oleh masyarakatnya.

2.2.3 Pengendalian Internal

2.2.3.1 Definisi Pengendalian Internal

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan

Perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Bastian (2015) pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Definisi tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Mulyadi (2016) mengatakan pengendalian internal mencakup struktur organisasi, ukuran maupun metode yang dikoordinasikan dalam mempertahankan aset organisasinya, melakukan pengecekan ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendukung efisiensi serta ditaatinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sarana dimana aset organisasi dilindungi dan semua pemangku kepentingan organisasi dapat mematuhi kebijakan yang diterapkan. Selain itu menjamin kredibilitas informasi yang dihasilkan organisasi, sehingga nantinya *output* yang berupa laporan akan mendapatkan kepercayaan.

2.2.3.2 Indikator Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan unsur sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya yang mencakup etika, kompetensi, integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.
- b. Penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup penentuan risiko di seluruh aspek organisasi dan penentuan kekuatan sebuah organisasi melalui evaluasi risiko. Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- c. Aktivitas pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas dan pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, audit internal dan audit internal. Aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.
- d. Informasi dan komunikasi, pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi

- dalam bentuk dan waktu yang tepat. Hal ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah satu potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan
- e. Pemantauan, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

2.2.3.3 Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa sangat penting agar anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dikelola dengan baik dan target yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah bahwa perlunya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan dalam suatu instansi pemerintah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Adanya pengendalian internal dapat menjadi dasar kebijakan

dan prosedur untuk mengurangi risiko, mengantisipasi penyimpangan dalam pemerintahan, dan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang teratur dan tertib. Oleh karena itu, pengendalian internal dilaksanakan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Secara umum permasalahan lemahnya pengendalian internal terdapat pada pengelolaan dana desa, terutama kegagalan sistem pengendalian internal pemerintah seperti korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan pajak. Beberapa risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan desa di tingkat pemerintahan desa, antara lain:

- a. Program pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa.
- b. Kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat.
- c. Kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.
- d. Pengelolaan aset desa yang tidak efektif dan efisien.

Hal ini akan menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Di antara berbagai kelemahan tersebut, untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif, maka pengendalian internal menjadi sangat penting. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud oleh COSO (*Commite of Sponsoring Organizations*) adalah

suatu metode yang terdiri dari serangkaian kebijakan dan peraturan untuk memantau, mengarahkan dan melindungi sumber daya perusahaan untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan. Jika pengendalian internal berjalan dengan baik dan dikelola secara jujur akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

2.2.4 Partisipasi Masyarakat

2.2.4.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan pemerintah, dimana masyarakat tidak hanya selaku utilitas, tetapi sebagai subjek pembangunan berkelanjutan.

Menurut Juniarti dkk (2022) partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat baik disampaikan langsung oleh masyarakat sendiri atau melalui wadah yang telah disediakan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Menurut Walyati (2020) partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang terlibat pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada

masyarakat, memilih, dan mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Ilhami (2019) partisipasi masyarakat merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan, dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan desa. Prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Masruhin dan Kaukab (2019) mengatakan partisipasi merupakan ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan keadaan desa setempat, menolak atau mendukung dan memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

2.2.4.2 Prinsip Partisipasi Masyarakat

Adapun prinsip-prinsip partisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Cakupan, semua orang atau wakil dari kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proses pembangunan.

- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), pada dasarnya setiap individu mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa.
- c. Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*), berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*), berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*), keterlibatan berbagai individu tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap individu itu sendiri, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama, diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.2.4.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat dalam Ilhami (2019) adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seseorang pria akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.

b. Usia

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia produktif juga sangat mempengaruhi pola berpikir masyarakat dalam ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi pendidikan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas pendidikan.

d. Tingkat Penghasilan

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta.

e. Mata Pencaharian (Pekerjaan)

Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi.

2.2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada. Masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel dan pembangunan desa akan menjadi semakin baik ke depannya.

2.2.5 Efektivitas

Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermakna juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program berhasil dilaksanakan. Suatu program dapat dikatakan terlaksana dengan efektif apabila pelaksanaan dalam mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan serta efektivitas merupakan perbandingan antara sasaran atau target yang ingin dicapai dengan keberhasilan dalam melaksanakan suatu

sasaran. Semakin mendekati capaian hasil atau target yang telah ditentukan, maka semakin efektif suatu perencanaan (Juniarti dkk, 2022).

Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa:

1. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, dan program desa yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan.
2. Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan program yang telah direncanakan hingga berakhirnya program desa.
3. Dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program desa.
4. Hasil dari program desa sesuai harapan masyarakat.

2.2.6 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tertuang dalam APBDes sehingga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan panduan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya.
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana - prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- f. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 pengalokasian dana desa setiap tahunnya memiliki rincian yang dihitung

melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten atau Kota. Berikut besaran alokasi dana desa yang dimaksud:

- a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b) 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
- c) 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan
- d) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Ketentuan penyaluran dana desa menurut Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 ada dua tahapan yang diterapkan untuk menyalurkan dana desa yakni tahap pertama dana sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Januari, tahap kedua dana sebesar 60% (enam puluh persen) disalurkan paling cepat pada bulan Juni. Tujuan pengalokasian dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Pelaksanaan

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa.

3. Penatausahaan

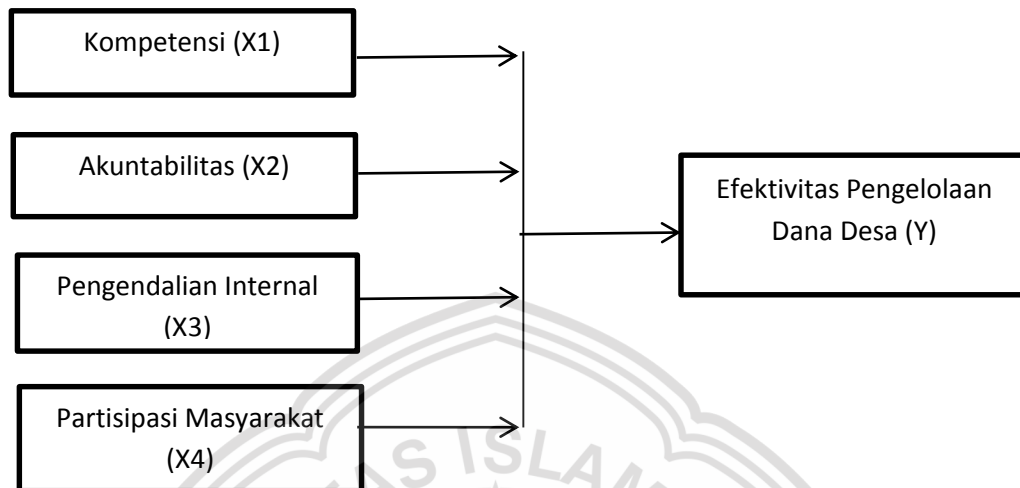
Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang telah dipaparkan. Maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Diduga bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang.

H2: Diduga bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang.

H3: Diduga bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang.

H4: Diduga bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana desa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*, yang menggunakan teknik angket (kuesioner). Sumber data diperoleh langsung dari beberapa pertanyaan. Oleh karena itu tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui lebih rinci dan lebih jelas tentang realita empiris (Sugiyono, 2016).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang terletak di Jl. Raya Kebonagung No 124, Sonosari, Kebonagung, Jawa Timur 65162.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perangkat atau aparatur Desa Kebonagung Malang.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2016) adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan/Perencanaan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pamong Praja.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) pengertian variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan operasional variabel adalah definisi yang disusun berdasarkan apa yang dapat diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu:

3.3.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel yang mempengaruhi perubahan variabel terikat (Sugiyono, 2016). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variabel*) adalah kompetensi (X1), akuntabilitas (X2), pengendalian internal (X3), dan partisipasi masyarakat (X4).

3.3.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) adalah efektivitas pengelolaan dana Desa Kebonagung Malang (Y).

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Pengertian dari operasional variabel menurut Sugiyono (2016) adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program berhasil dilaksanakan. Suatu program dapat dikatakan terlaksana dengan efektif apabila pelaksanaan dalam mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Serta efektivitas merupakan perbandingan antara sasaran atau target yang ingin dicapai dengan keberhasilan dalam melaksanakan suatu sasaran. Semakin mendekati capaian hasil atau target yang telah ditentukan, maka semakin efektif suatu perencanaan. Variabel efektivitas pengelolaan dana desa memiliki empat item pertanyaan dari sumber jurnal Waladiyah (2018), yaitu:

1. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, dan program desa yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan.
2. Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan program yang telah direncanakan hingga berakhirnya program desa.
3. Dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program desa.
4. Hasil dari program desa sesuai harapan masyarakat.

3.4.2 Kompetensi (X1)

Kompetensi menurut beberapa pakar adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Kompetensi atau *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Moeheriono (2012) mengatakan kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode waktu periode tertentu. Variabel kompetensi ini memiliki sembilan item pertanyaan dari sumber jurnal Waladiyah (2018), yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*)
 1. Aparatur pemerintah desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
 2. Aparatur pemerintah desa mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya.
 3. Aparatur pemerintah desa memahami setiap tugasnya dan telah melaksanakan dengan baik.
 4. Aparatur pemerintah desa mampu mengoperasikan komputer.
 5. Aparatur pemerintah desa memahami ilmu akuntansi.
 6. Aparatur pemerintah desa mengelola dan mengatur pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu.
 7. Aparatur pemerintah desa mampu membimbing karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya.

8. Aparatur pemerintah desa hadir dan pulang dari tempat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
9. Aparatur pemerintah desa membuat catatan atau dokumentasi untuk setiap transaksi yang benar.

3.4.3 Akuntabilitas (X2)

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah sebuah pertanggungjawaban untuk memberikan jawaban atas dana yang dianggarkan, yang bisa mengindikasikan hasil kinerja seseorang maupun organisasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditunjuk oleh para pihak terkait untuk memiliki hak serta wewenang dalam memberikan hasil dan tanggung jawabnya. Variabel akuntabilitas ini memiliki enam item pertanyaan dari sumber jurnal Waladiyah (2018), yaitu:

- a. Perencanaan
 1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- b. Pelaksanaan
 1. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 2. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- c. Penatausahaan
 1. Bendahara desa membuat buku kas umum.

d. Pelaporan

1. Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota.

e. Pertanggungjawaban

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.4.4 Pengendalian Internal (X3)

Pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Variabel pengendalian internal ini memiliki lima item pertanyaan dari sumber jurnal Hartami (2021), yaitu :

1. Adanya pengawasan dari pihak internal yakni dari Inspektorat Kabupaten Malang setiap 1 (satu) bulan sekali.
2. Adanya pengawasan dari pihak internal yakni dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Adanya pengawasan dari pihak eksternal yakni masyarakat desa tersebut.
4. Adanya komunikasi yang telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif di antara pelaksana kegiatan dan pemerintah desa.

5. Adanya tindak lanjut dari setiap hasil temuan atau *review* dan saran yang diberikan oleh Inspektorat dengan cara mengirimkan *file* dan dokumentasi

3.4.5 Partisipasi Masyarakat (X4)

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada prosedur pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan. Dimana masyarakat tidak hanya selaku akseptor sarana dan utilitas, tetapi sebagai subjek pembangunan berkelanjutan. Variabel partisipasi masyarakat ini memiliki lima item pertanyaan dari sumber jurnal Hartami (2021), yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat
 1. Masyarakat desa selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
 2. Masyarakat desa bersedia berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.
- b. Adanya pengawasan dari masyarakat
 1. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa, menyampaikan aspirasi, saran maupun kritikan kepada pengelola dana desa.
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

1. Masyarakat bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.
2. Masyarakat bersedia menjaga, melestarikan dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.

3.5 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara menyebarkan angket (kuesioner) kepada perangkat atau aparatur Desa Kebonagung Malang.

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah skala *likert*. Kriteria bobot penilaian dari setiap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang dijawab responden adalah sebagai berikut:

1. STS : Sangat tidak setuju (diberi skor 1)
2. TS : Tidak setuju (diberi skor 2)
3. CS : Cukup setuju (diberi skor 3)
4. S : Setuju (diberi skor 4)

5. SS : Sangat setuju (diberi skor 5)

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi linier yang digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen jika nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan analisis tersebut dengan melibatkan satu variabel dependen (Y) dan empat variabel independen (X1, X2, X3 dan X4). Berikut persamaan regresi linier berganda bisa dirumuskan yaitu (Sugiyono, 2016):

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

a : Bilangan konstanta

b : Koefisien regresi

X1 : Kompetensi

X2 : Akuntabilitas

X3 : Pengendalian Internal

X4 : Partisipasi Masyarakat

e : *Standart Error Estimates*

3.6.1 Uji Kualitas Data

Pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas merupakan syarat yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif yang

bersumber dari data primer dengan menggunakan alat ukur kuesioner (Sugiyono, 2016).

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. “Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut” (Ghozali, 2016). Metode yang akan di gunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antara skor butir pernyataan

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016) uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable* dan digunakan untuk mengukur berkali-kali untuk menghasilkan data yang sama (konsistensi). Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas konsisten ialah *Cronbach Alpha* yaitu derajat ketepatan yang handal, ketelitian atau akurasi yang ditinjau oleh instrumen pengukuran, dengan kriteria hasil pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai *Cronbach Alpha* hasil perhitungan $> 0,6$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel penelitian reliabel.
2. Jika nilai *Cronbach Alpha* hasil perhitungan $< 0,6$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel penelitian tidak reliabel.

Berikut ini adalah rumus *Cronbach Alpha*:

$$r_{i1} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^a}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{i1} : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^a$: jumlah varian butir

σ_t^2 : varian total

3.6.2 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji data apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *One Sample – Kolmogorov Smirnov monte carlo* untuk menguji normalitas residual. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*) sebagai berikut:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka populasi tidak terdistribusi normal.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen = 0. Berikut kriteria umum yang digunakan dalam pengujian metode VIF yaitu:

1. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.
2. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi suatu data ada atau tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi variabel

independen ada heteroskedastisitas atau tidak bisa dilihat dari nilai probabilitas, yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari dugaan sementara.

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada intinya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Significance Level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hipotesis uji F yaitu:

1. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak (koefisien regresi signifikan).
2. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

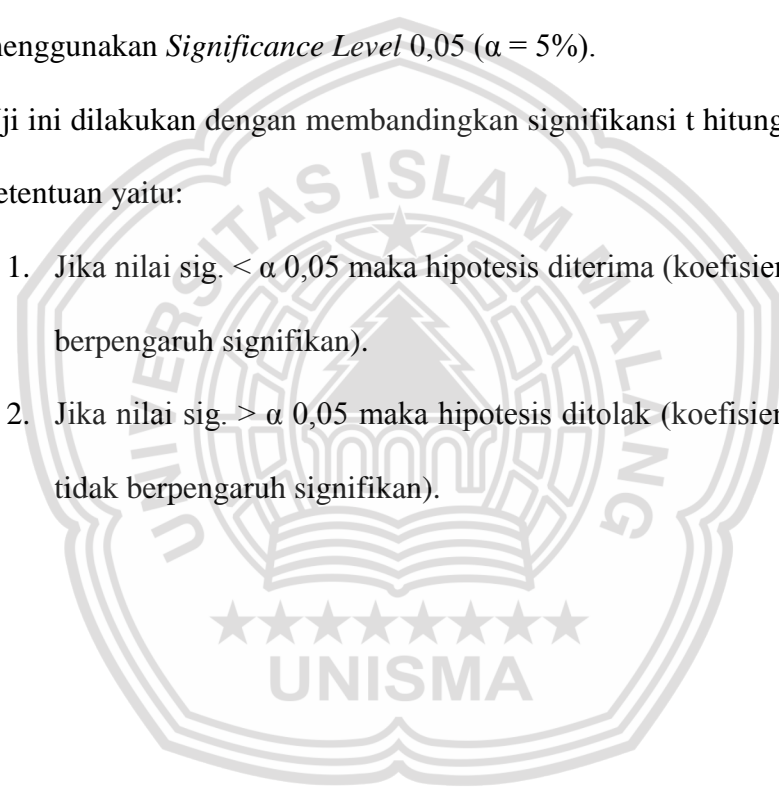
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada intinya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Significance Level* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan ketentuan yaitu:

1. Jika nilai sig. $< \alpha$ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi berpengaruh signifikan).
2. Jika nilai sig. $> \alpha$ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak berpengaruh signifikan).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat atau aparatur desa Kebonagung Malang yang berjumlah 40 orang. Pada penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang ada, dengan mengambil sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perhitungan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perangkat atau Aparatur Desa Kebonagung Malang	15
Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	15
Jumlah Pamong Praja Desa Kebonagung Malang	10
Jumlah Kuesioner yang disebar	40
Jumlah Sampel	40

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan jumlah aparatur atau perangkat desa Kebonagung Malang berjumlah 15 orang, Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berjumlah 15 orang, dan jumlah Pamong Praja berjumlah 10 orang. Sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 40 kuesioner, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 kuesioner.

4.1.2 Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberi informasi mengenai variabel-variabel penelitian pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	40	29	45	36.88	4.988
Akuntabilitas	40	20	30	25.80	2.738
Pengendalian Internal	40	15	25	19.93	3.300
Partisipasi Masyarakat	40	16	25	20.63	2.897
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	40	13	20	18.32	1.670
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Output SPSS, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan *descriptive* variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel yang valid sebanyak 40 responden adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kompetensi (X1) mempunyai nilai *minimum* sebesar 29; nilai *maximum* sebesar 45; *mean* sebesar 36.87; dengan *standar deviasi* sebesar 4.988. Nilai *standar deviasi* lebih kecil daripada nilai *mean* maka menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dalam efektivitas pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.

- b. Variabel akuntabilitas (X2) mempunyai nilai *minimum* sebesar 20; nilai *maximum* sebesar 30; *mean* sebesar 25.80; dengan *standar deviasi* sebesar 2.738. Nilai *standar deviasi* lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik.
- c. Variabel pengendalian internal (X3) mempunyai nilai *minimum* sebesar 15; *maximum* sebesar 25; *mean* sebesar 19.92; dengan *standar deviasi* sebesar 3.300. Nilai *standar deviasi* lebih kecil daripada *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah. *Mean* menunjukkan bahwa persepsi responden tentang pengendalian internal sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang telah diberikan.
- d. Variabel partisipasi masyarakat (X4) mempunyai nilai *minimum* sebesar 16; *maximum* sebesar 25; *mean* sebesar 20.62; dengan *standar deviasi* sebesar 2.897. Nilai *standar deviasi* lebih kecil daripada *mean* yang artinya partisipasi masyarakat dalam efektivitas pengelolaan dana desa telah melakukan perannya dengan baik.
- e. Variabel efektivitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai *minimum* sebesar 13; *maximum* sebesar 20; *mean* sebesar 18.32; dengan *standar deviasi* sebesar 1.670. Nilai *standar deviasi* lebih kecil daripada *mean* yang artinya penyebaran data baik dan penyimpangan rendah.

Maka efektivitas pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dengan r tabel dengan jumlah $n = 40$ adalah 0.312. Syarat dikatakan valid suatu instrumen apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	R Tabel	Keterangan
Kompetensi (X1)	X1.1	0,638	0,312	Valid
	X1.2	0,638	0,312	Valid
	X1.3	0,761	0,312	Valid
	X1.4	0,681	0,312	Valid
	X1.5	0,812	0,312	Valid
	X1.6	0,614	0,312	Valid
	X1.7	0,611	0,312	Valid
	X1.8	0,779	0,312	Valid
	X1.9	0,518	0,312	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,832	0,312	Valid
	X2.2	0,513	0,312	Valid
	X2.3	0,859	0,312	Valid
	X2.4	0,613	0,312	Valid
	X2.5	0,643	0,312	Valid
	X2.6	0,774	0,312	Valid
Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,873	0,312	Valid
	X3.2	0,767	0,312	Valid
	X3.3	0,842	0,312	Valid
	X3.4	0,667	0,312	Valid
	X3.5	0,657	0,312	Valid
Partisipasi Masyarakat (X4)	X4.1	0,683	0,312	Valid
	X4.2	0,887	0,312	Valid
	X4.3	0,872	0,312	Valid
	X4.4	0,711	0,312	Valid

	X4.5	0,628	0,312	Valid
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0,737	0,312	Valid
	Y.2	0,662	0,312	Valid
	Y.3	0,746	0,312	Valid
	Y.4	0,809	0,312	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini mempunyai r hitung lebih besar dari r tabel 0,312 dengan demikian semua indikator hasilnya valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Sugiyono (2016) Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel yang digunakan untuk mengukur berkali-kali untuk menghasilkan data yang sama (konsistensi). Teknik yang digunakan untuk menguji Reliabilitas konsisten ialah *Cronbach Alpha* yaitu derajat ketepatan yang handal, ketelitian atau akurasi yang ditinjau oleh instrumen pengukuran, dengan kriteria hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi (X1)	0.848	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.790	Reliabel
Pengendalian Internal (X3)	0.815	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X4)	0.814	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.720	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan uji reliabilitas dalam tabel 4.4 di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi (X1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,848, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi dinyatakan reliabel.
2. Variabel Akuntabilitas (X2) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,790, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas dinyatakan reliabel.
3. Variabel Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,815, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal dinyatakan reliabel.
4. Variabel Partisipasi Masyarakat (X4) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,814, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat dinyatakan reliabel.
5. Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,720, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan reliabel.

4.2.3 Uji Normalitas

Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji data apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji asumsi ini, dapat menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov monte carlo*. Bila probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov monte carlo* lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal dan apabila lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46676519
Most Extreme Differences	Absolute	.156
	Positive	.108
	Negative	-.156
Test Statistic		.156
Asymp. Sig. (1-tailed)		.015 ^c
Monte Carlo Sig. (1-tailed)		.129 ^d
Carlo Sig. (1-tailed) Confidence Interval	99% Lower Bound	.247
	Upper Bound	.269

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data pada tabel 4.5 menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov Monte Carlo* terhadap model regresi linear antara kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa diperoleh nilai sebesar 0,129 lebih besar dari 0,05 yang berarti dalam model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi secara normal.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Salah satu metode yang digunakan dalam menguji multikolinearitas adalah menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila nilai $VIF > 10$ maka menunjukkan adanya multikolinearitas. Dan sebaliknya, apabila nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.510	2.435		0.000	1.000		
	X1	.000	.145	.000	.000	1.000	.118	8.453
	X2	.000	.167	.000	.000	1.000	.296	3.382
	X3	.000	.197	.000	.000	1.000	.145	6.889
	X4	.000	.155	.000	.000	1.000	.305	3.276

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.6, Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini memiliki $VIF < 10$ dengan nilai $Tolerance > 0,1$, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan

kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.422	1.191		0.355	0.725
	X1	-0.114	0.071	-0.745	-1.613	0.116
	X2	0.018	0.081	0.064	0.220	0.827
	X3	0.151	0.096	0.654	1.567	0.126
	X4	0.075	0.076	0.285	0.989	0.329

Sumber: Output SPSS,2022

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi variabel Kompetensi sebesar 0,116; variabel Akuntabilitas sebesar 0,827; variabel Pengendalian Internal sebesar 0,126; dan variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0,329. Hasil tes ini menunjukkan bahwa semua nilai menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05 masing-masing variabel terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yang berguna untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen (Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat) terhadap variabel dependen (Efektivitas Pengelolaan Dana Desa).

Tabel 4. 8 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.848	3.010		0.946	0.350
	X1	0.147	0.052	0.265	2.846	0.007
	X2	0.629	0.085	0.085	7.425	0.000
	X3	0.147	0.052	0.288	3.758	0.000
	X4	0.629	0.085	0.305	2.107	0.038

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.848 + 0.147X_1 + 0.629X_2 + 0.147X_3 + 0.629X_4 + e$$

Dari persamaan regresi di atas menunjukkan koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel bebas ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan pada variabel terikatnya.

Artinya:

- Nilai konstanta regresi adalah sebesar 2,848 dapat dijelaskan bahwa jika semua variabel konstan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa.
- Pengujian kompetensi (X1) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) secara parsial diperoleh nilai 0,147 yang berarti setiap meningkatnya variabel kompetensi (X1) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) akan meningkat 14,7%
- Pengujian kompetensi (X2) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) secara parsial diperoleh nilai 0,629 yang berarti setiap meningkatnya

variabel akuntabilitas (X2) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) akan meningkat 62,9%

- d. Pengujian pengendalian internal (X3) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) secara parsial diperoleh nilai 0,147 yang berarti setiap meningkatnya variabel pengendalian internal (X3) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) akan meningkat 14,7%
- e. Pengujian partisipasi masyarakat (X4) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) secara parsial diperoleh nilai 0,629 yang berarti setiap meningkatnya variabel partisipasi masyarakat (X4) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Y) akan meningkat 62,9%

4.2.6 Uji Hipotesis

4.2.6.1 Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dengan melakukan uji kelayakan model dengan menggunakan uji F. Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	142.902	2	71,451	59,667	0
	Residual	49.098	41	1.198		
	Total	192,00	43			

Sumber: Output SPSS, 2022

Dalam hasil uji F di atas, nilai F hitung sebesar 59,667 dengan signifikan 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa koefisien regresi kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

4.2.6.2 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2016) menyatakan bahwa “Jika dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted R²* negatif, maka nilai *Adjusted R²* dianggap bernilai 0. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka nilai $Adjusted R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $Adjusted R^2 = (1 - k) / (n - k)$. Jika $k > 1$, maka *Adjusted R²* akan bernilai negatif”.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	0.744	0.732	1.09430

Sumber: Output SPSS, 2022

Besarnya kontribusi dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.10 dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,732. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-variabel bebas (Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Partisipasi

Masyarakat) yang disertakan dalam persamaan regresi terhadap variabel tetap (Efektivitas Pengelolaan Dana Desa) adalah sebesar 73,2%, sedangkan 26,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

4.2.6.3 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.848	3.010		0.946	0.350
	X1	0.147	0.052	0.265	2.846	0.007
	X2	0.629	0.085	0.085	7.425	0.000
	X3	0.147	0.052	0.288	3.758	0.000
	X4	0.629	0.085	0.305	2.107	0.019

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel di atas, Uji parsial (t) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel kompetensi (X1) memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,846 dan nilai signifikansi sebesar 0,035. Nilai tersebut < 0,05 yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa (Y). sehingga hipotesis H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa

kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa apabila Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki aparat desa semakin meningkat pula efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi akan dapat mengelola dana desa dengan baik . tingginya tingkat kompetensi dapat ditempuh melalui pendidikan yang tinggi, tidak hanya itu, pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa dengan baik. Melalui pelatihan tersebut kompetensi aparat desa akan meningkat dan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Di samping itu aparatur pemerintah desa bisa mengoperasikan komputer, serta aparatur pemerintah desa diharuskan membuat catatan atau dokumentasi untuk setiap transaksi yang benar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dimana hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel akuntabilitas (X₂) memiliki nilai statistik uji t sebesar 7.425 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut $< 0,05$ yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa (Y). sehingga hipotesis H₂ diterima dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa akuntabilitas menjadi suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan. Dengan adanya akuntabilitas maka sistem keuangan dan laporan keuangannya akan terstruktur dengan baik dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Jadi semakin baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Kantor Desa Kebonagung, maka berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana Desa Kebonagung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kumalasari dan Widajantie (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon. Dimana hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel pengendalian internal (X3) memiliki nilai statistik uji t sebesar 3,758 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut $< 0,05$ yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa (Y). sehingga hipotesis H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa sangat penting agar anggaran pendapatan dan belanja desa dapat terkelola dengan baik dan target yang diharapkan dapat tercapai.

Jika pengendalian internal dilakukan melalui pengawasan dari pihak internal dan eksternal dilaksanakan dengan komunikasi yang efektif dan melakukan tindak lanjut dalam setiap hasil temuan, maka dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah bahwa perlunya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan dalam suatu instansi pemerintah, yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan pengelolaan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

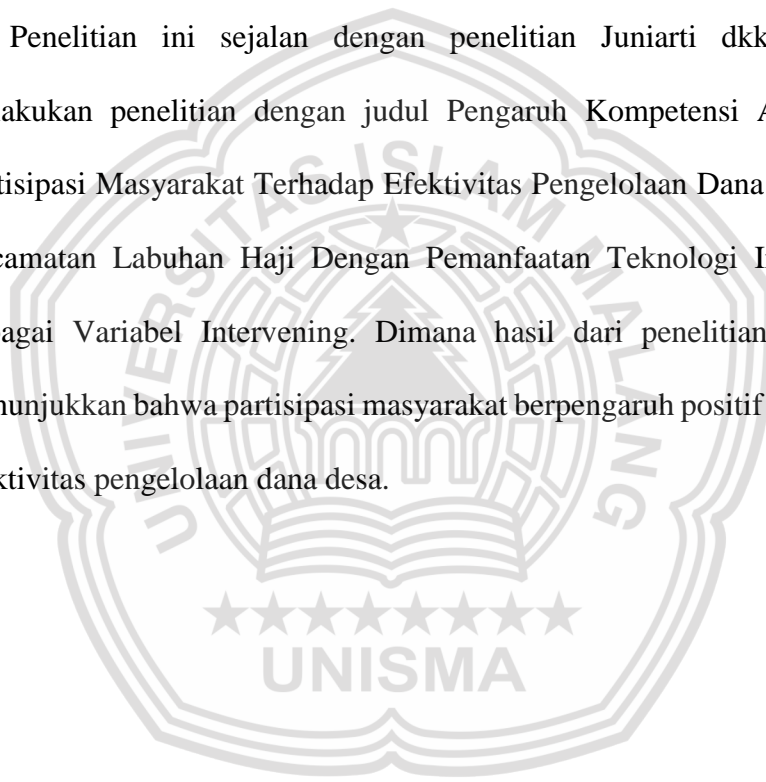
4. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel kompetensi (X4) memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,107 dan nilai signifikansi sebesar 0,019. Nilai tersebut $< 0,05$ yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa (Y). sehingga hipotesis H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Keberhasilan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam efektivitas pengelolaan dana desa, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhan sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Juniarti dkk (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. Dimana hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang. Alat pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat dijelaskan bahwa apabila kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat pada kantor desa Kebonagung Malang berjalan dengan baik, maka berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka semakin meningkat pula efektivitas dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi suatu unsur penting dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya akuntabilitas sistem

keuangan di setiap desa akan tersusun dengan baik, pengendalian internal berperan penting terhadap pengelolaan dana desa agar anggaran pendapatan dapat dikelola dengan baik, dan partisipasi masyarakat juga membantu dalam perkembangan suatu desa, dengan adanya ide atau dukungan maka dapat memberikan dampak yang positif bagi desa.

5.2 Keterbatasan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu:

1. Tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Kurangnya minat membaca pertanyaan yang telah diberikan
3. Keterlambatan pengumpulan pengisian kuesioner

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menerapkan metode survei melalui kuesioner dengan ditambahkan teknik wawancara secara langsung, agar data dari responden akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan membantu menjelaskan kepada para responden, agar data yang diberikan oleh responden sesuai yang diharapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan membuat jadwal pertemuan terlebih dahulu dan memberikan *deadline*, agar kuesioner dapat selesai tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Andangatmadja. (2011). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Volume 01, No 1.
- Aryani, D., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(2), 178-190.
- Bastian. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Surabaya: Erlangga.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartami, D. F. (2021). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Kebonsari). (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Ilhami, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 66-79.
- Juniarti, U., Inapty, B. A., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608-620.
- Kumalasari, D. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap

- Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1116-1122.
- Mardiasmo. (2018). *Serial Otonomi Daerah: otonomi manajemen dan keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118-130.
- Moeheriono, Prof. M.Si, (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi (Edisi Empat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di

- Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183-198.
- Robbins, S. P. (2016). *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi (Edisi Enam Belas)*. Surabaya: Salemba Empat.
- Saputra, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Bantul. (*Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*).
- Saputri, A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kecamatan Mranggen). (*Doctoral Dissertation, Universitas Semarang*).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Waladiyah, U. (2018). Pengaruh Kepatuhan Atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (*Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya*).
- Walyati, F. N. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan). (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang*).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian



Nomor 1672/B41/U 08/D/G 46/XI/2022
Lampiran -
Perihal Permohonan Ijin Penelitian

19 November 2022

Yth **Kantor desa kebonagung malang**
*Jl Raya kebonagung no 124 sonotani kebonagung kec palisaji kab malang Jawa timur. Kode pos 65162
Jawa Timur*

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sebagai kelengkapan tugas Skripsi, maka mahasiswa diwajibkan melakukan Penelitian.

Untuk keperluan tersebut, maka kami mengharap Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberikan ijin Penelitian pada Mahasiswa kami dibawah ini.

Adapun nama mahasiswa kami tersebut adalah :

Nama : **RATIEH ALDELA MEGAAYU ISTIQOMAH**
Nomor Induk Mahasiswa : 21901082110
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : **pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa kebonagung malang**

Oleh karena itu harapan kami Mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima melaksanakan Penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui,


NURDIANA, SE., MSI
NPP 1970100007

Pembimbing I,


Dr. DWIYANI SUDARYANTI, SE., MSI
NPP 193009197332254

Pembimbing II,


DEWI LAILI FAKHRIYAH, SE., MSA
NPP 190212198732207

UNISMA dan NU untuk Eksistensi dan Perbaikan Dunia



Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAKISAJI
DESA KEBONAGUNG
Jalan Raya Kebonagung No. 124 Kode Pos 65161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 410/057/35.07.19.2012/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TEGUH SANTOSA
Jabatan : Kepala Desa Kebonagung
Alamat : Dsn Sonosari RT.044 RW.008 Desa Kebonagung
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Dengan ini menerangkan

Nama : RATIEH ALDELA MEGAAJU ISTIQOMAH
NIM : 21901082110
Jurusan : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Malang

Telah melakukan penelitian di Kantor Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang pada bulan November – selesai 2022 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **PENGARUH KOMPETENSI, AKUNTABILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA KEBONAGUNG MALANG.**

Demikian Surat Keterangan Ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonagung, 26 Desember 2022

An. Kepala Desa Kebonagung



SUNARDI

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH KOMPETENSI, AKUNTABILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA KEBONAGUNG MALANG

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Aparatur Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratieh Aldela Megaayu Istiqomah

NPM : 21901082110

Program Studi : Akuntansi (S1)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Saat ini sedang melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang”

Mohon berkenan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap, jujur dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kuesioner ini dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian yang dimaksud. Saya akan menjaga kerahasiaan dari data yang diberikan.

Atas bantuan, perhatian serta waktu luang yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ratieh Aldela M.I

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
3. Usia
 - < 30 Tahun
 - 30-40 Tahun
 - > 40 Tahun
4. Tingkat Pendidikan
 - SMA/SMK/Sederajat
 - Diploma
 - Sarjana
 - Pascasarjana
5. Jabatan :
6. Masa Kerja di Kantor Desa Kebonangung Malang
 - < 5 Tahun
 - 5-10 Tahun
 - > 10 Tahun

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah kembali pernyataan yang tertulis sebelum memberikan pilihan
2. Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan:
 - STS : Sangat tidak setuju (diberi skor 1)
 - TS : Tidak setuju (diberi skor 2)
 - CS : Cukup setuju (diberi skor 3)
 - S : Setuju (diberi skor 4)
 - SS : Sangat setuju (diberi skor 5)

Kompetensi (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
1.	Aparatur pemerintah desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.					
2.	Aparatur pemerintah desa mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya.					
3.	Aparatur pemerintah desa memahami setiap tugasnya dan telah melaksanakan dengan baik.					
4.	Aparatur pemerintah desa mampu mengoperasikan komputer.					
5.	Aparatur pemerintah desa memahami ilmu akuntansi.					
6.	Aparatur pemerintah desa mengelola dan mengatur pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu.					
7.	Aparatur pemerintah desa mampu membimbing karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya.					
8.	Aparatur pemerintah desa hadir dan pulang dari tempat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.					

9.	Aparatur pemerintah desa membuat catatan atau dokumentasi untuk setiap transaksi yang benar.					
----	--	--	--	--	--	--

Akuntabilitas (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
a.	Perencanaan					
1.	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.					
b.	Pelaksanaan					
1.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.					
2.	Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.					
c.	Penatausahaan					
1.	Bendahara desa membuat buku kas umum.					
d.	Pelaporan					
1.	Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota.					
e.	Pertanggungjawaban					

1.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.					
----	--	--	--	--	--	--

Pengendalian Internal (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
1.	Adanya pengawasan dari pihak internal yakni dari Inspektorat Kabupaten Malang setiap 1 (satu) bulan sekali.					
2.	Adanya pengawasan dari pihak internal yakni BPD (Badan Permusyawaratan Desa).					
3.	Adanya pengawasan dari pihak eksternal yakni masyarakat desa tersebut.					
4.	Adanya komunikasi yang telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif di antara pelaksana kegiatan dan pemerintah desa.					
5.	Adanya tindak lanjut dari setiap hasil temuan atau <i>review</i> dan saran yang diberikan oleh Inspektorat dengan cara mengirimkan <i>file</i> dan dokumentasi.					

Partisipasi Masyarakat (X4)

No	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
a.	Partisipasi Masyarakat					
1.	Masyarakat desa selalu dilibatkan dalam perencanaan					

	dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.					
2.	Masyarakat desa bersedia berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.					
b.	Adanya pengawasan dari masyarakat					
1.	Masyarakat diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa, menyampaikan aspirasi, saran maupun kritikan kepada pengelola dana desa.					
c.	Adanya partisipasi masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa					
1.	Masyarakat bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.					
2.	Masyarakat bersedia menjaga, melestarikan dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.					

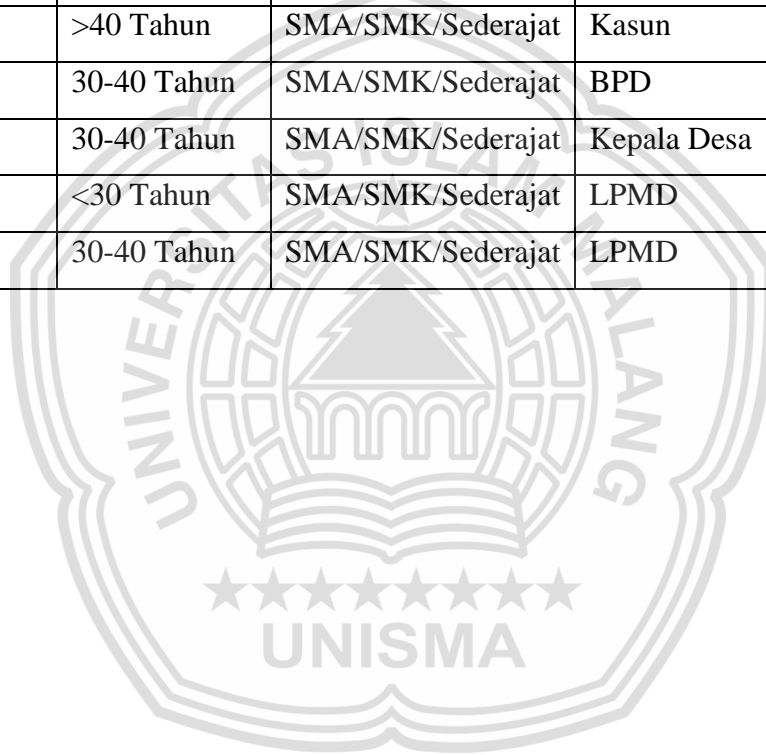
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
1.	Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif, dan program desa yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan.					
2.	Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan program yang telah direncanakan hingga berakhirnya program desa.					
3.	Dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program desa.					
4.	Hasil dari program desa sesuai harapan masyarakat.					

Lampiran 4. Data Karakteristik Responden

NO	Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan	Jabatan	Masa Kerja
1	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	5-10 Tahun
2	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Staff	<5 Tahun
3	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasun	>10 Tahun
4	P	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kaur	5-10 Tahun
5	P	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	5-10 Tahun
6	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
7	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasun	>10 Tahun
8	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kaur	5-10 Tahun
9	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasun	>10 Tahun
10	L	<30 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	<5 Tahun
11	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	<5 Tahun
12	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
13	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
14	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
15	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
16	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasi	<5 Tahun
17	L	<30 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	<5 Tahun
18	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
19	P	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
20	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	5-10 Tahun
21	L	<30 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasun	<5 Tahun
22	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
23	P	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	5-10 Tahun
24	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
25	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	<5 Tahun
26	P	<30 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	<5 Tahun
27	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Staff	>10 Tahun

28	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
29	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Sekretaris Desa	>10 Tahun
30	L	>40 Tahun	Sarjana	Kasi	>10 Tahun
31	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasun	5-10 Tahun
32	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
33	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
34	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kaur	5-10 Tahun
35	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Pamong Praja	5-10 Tahun
36	L	>40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kasun	>10 Tahun
37	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	BPD	5-10 Tahun
38	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	Kepala Desa	5-10 Tahun
39	L	<30 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	<5 Tahun
40	L	30-40 Tahun	SMA/SMK/Sederajat	LPMD	5-10 Tahun



Lampiran 5. Tabulasi Jawaban Responden

Variabel Kompetensi (X1)

NO	KOMPETENSI (X1)									
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	43
5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
6	4	4	5	5	4	4	4	5	4	39
7	4	4	5	4	4	5	5	5	4	40
8	4	4	5	4	4	5	5	5	4	40
9	4	4	5	5	4	4	4	5	4	39
10	4	4	5	5	5	5	4	5	5	42
11	5	5	3	5	4	5	5	5	5	42
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	4	4	5	4	4	5	5	5	4	40
16	3	3	3	3	3	5	3	4	4	31
17	4	4	3	3	3	5	3	3	4	32
18	5	5	3	3	3	5	3	3	4	34
19	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29
20	3	3	3	4	3	4	3	3	4	30
21	4	4	3	4	3	4	3	5	5	35
22	3	3	3	4	3	4	3	3	4	30
23	3	3	3	4	3	4	3	3	4	30
24	4	4	3	4	3	4	5	4	4	35
25	4	4	4	4	2	4	4	4	4	34

26	3	3	3	4	3	4	4	4	5	33
27	3	3	2	3	2	4	5	4	5	31
28	4	4	3	3	2	4	5	5	4	34
29	4	4	2	3	2	4	4	3	4	30
30	5	5	2	3	2	4	4	3	4	32
31	4	4	2	4	3	4	5	4	5	35
32	5	5	3	5	2	5	4	3	3	35
33	4	4	2	3	4	4	5	5	4	35
34	5	5	3	4	3	4	3	3	5	35
35	3	3	3	5	5	4	5	5	5	38
36	5	5	2	3	4	5	4	4	4	36
37	5	5	4	5	3	4	3	5	5	39
38	4	4	5	4	5	5	3	4	4	38
39	5	5	3	2	4	4	4	5	5	37
40	5	5	4	3	3	5	5	4	4	38

Variabel Akuntabilitas (X2)

NO	AKUNTABILITAS (X2)						TOTAL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	5	30
5	3	3	4	3	4	4	21
6	4	5	4	4	4	4	25
7	5	4	5	4	5	4	27
8	5	4	5	4	5	4	27
9	4	5	4	4	4	4	25
10	4	4	4	3	4	4	23

11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	4	5	5	5	5	29
14	5	4	5	4	5	5	28
15	5	5	5	4	5	4	28
16	3	4	4	5	4	3	23
17	3	5	4	4	4	4	24
18	3	5	4	5	4	5	26
19	3	4	4	5	4	3	23
20	3	5	4	4	4	3	23
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	3	23
23	4	3	4	4	5	3	23
24	4	5	4	4	4	4	25
25	4	5	4	4	4	4	25
26	4	4	4	4	4	3	23
27	4	4	4	4	5	3	24
28	4	4	4	5	4	4	25
29	4	4	5	4	4	4	25
30	4	3	4	4	5	5	25
31	5	3	5	4	5	4	26
32	5	4	5	4	5	5	28
33	4	4	4	4	4	4	24
34	5	4	5	5	5	5	29
35	3	3	3	4	4	3	20
36	5	4	5	5	4	5	28
37	4	3	4	4	4	5	24
38	5	3	5	3	5	4	25
39	4	4	4	4	4	5	25
40	5	5	5	5	4	5	29

Variabel Pengendalian Internal (X3)

NO	PENGENDALIAN INTERNAL (X3)					
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	5	5	23
5	4	4	3	4	3	18
6	5	5	4	4	4	22
7	5	4	4	5	5	23
8	5	4	4	5	5	23
9	5	5	4	4	4	22
10	5	5	5	5	4	24
11	3	5	4	5	5	22
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	5	4	4	5	5	23
16	3	3	3	5	3	17
17	3	3	3	5	3	17
18	3	3	3	5	3	17
19	3	3	3	4	3	16
20	3	4	3	4	3	17
21	3	4	3	4	4	18
22	3	4	3	4	4	18
23	3	4	3	4	4	18
24	3	4	3	4	4	18
25	4	4	2	4	4	18
26	3	4	3	4	4	18
27	2	3	2	4	4	15

28	3	3	2	4	4	16
29	2	3	2	4	4	15
30	2	3	2	4	4	15
31	2	4	3	4	5	18
32	3	5	2	5	5	20
33	2	3	4	4	4	17
34	3	4	3	4	5	19
35	3	5	5	4	3	20
36	2	3	4	5	5	19
37	4	5	3	4	4	20
38	5	4	5	5	5	24
39	3	2	4	4	4	17
40	4	3	3	5	5	20

Variabel Partisipasi Masyarakat (X4)

NO	PARTISIPASI MASYARAKAT (X4)					TOTAL
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	5	25
5	4	3	3	3	3	16
6	4	4	4	4	4	20
7	5	4	4	4	4	21
8	5	4	4	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20
10	4	3	3	3	3	16
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25

13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	4	24
15	5	5	4	4	4	22
16	4	3	3	5	5	20
17	4	3	3	4	4	18
18	4	3	3	5	5	20
19	4	3	3	5	5	20
20	4	3	3	4	4	18
21	4	3	3	4	4	18
22	4	3	3	4	4	18
23	4	3	3	4	4	18
24	4	3	3	4	4	18
25	4	3	3	4	4	18
26	4	3	2	4	4	17
27	4	3	3	4	4	18
28	4	2	2	4	5	17
29	5	5	5	4	4	23
30	4	3	3	4	4	18
31	5	2	3	4	3	17
32	5	5	5	4	4	23
33	4	4	4	5	4	21
34	5	3	5	4	5	22
35	3	4	4	4	4	19
36	5	5	3	5	5	23
37	4	5	5	4	4	22
38	5	4	4	3	3	19
39	4	5	5	5	4	23
40	5	4	4	4	5	22

Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Y)				
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	TOTAL
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	5	20
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	5	5	4	5	19
6	5	5	5	5	20
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	5	5	5	5	20
10	5	5	5	5	20
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	5	20
15	4	4	4	4	16
16	5	5	5	5	20
17	5	4	5	4	18
18	4	5	5	5	19
19	4	4	4	5	17
20	5	5	4	4	18
21	5	5	5	5	20
22	5	4	5	5	19
23	5	4	4	5	18
24	5	5	4	5	19
25	5	4	4	4	17
26	5	4	4	5	18
27	4	4	4	5	17
28	5	4	5	4	18
29	4	5	5	5	19
30	5	4	5	5	19
31	5	4	4	4	17
32	4	5	5	5	19
33	5	4	5	4	18
34	3	3	4	3	13
35	5	4	4	5	18

36	4	5	3	4	16
37	5	3	5	5	18
38	4	5	4	3	16
39	5	4	5	5	19
40	4	4	4	4	16



Lampiran 6. Hasil Uji SPSS

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	40	29	45	36.88	4.988
Akuntabilitas	40	20	30	25.80	2.738
Pengendalian Internal	40	15	25	19.93	3.300
Partisipasi Masyarakat	40	16	25	20.63	2.897
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	40	13	20	18.32	1.670
Valid N (listwise)	40				

Hasil Uji Validitas

Variabel Kompetensi (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	1.000**	.276	.228	.288	.482**	.306	.282	.236	.638**
	Sig. (2-tailed)		.000	.084	.158	.072	.002	.055	.078	.143	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.2	Pearson Correlation	1.000**	1	.276	.228	.288	.482**	.306	.282	.236	.638**
	Sig. (2-tailed)	.000		.084	.158	.072	.002	.055	.078	.143	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.3	Pearson Correlation	.276	.276	1	.631**	.673**	.512**	.249	.575**	.171	.761**
	Sig. (2-tailed)	.084	.084		.000	.000	.001	.121	.000	.292	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.4	Pearson Correlation	.228	.228	.631**	1	.543**	.266	.270	.452**	.360*	.681**
	Sig. (2-tailed)	.158	.158	.000		.000	.097	.092	.003	.023	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.5	Pearson Correlation	.288	.288	.673**	.543**	1	.529**	.373*	.649**	.474**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.072	.072	.000	.000		.000	.018	.000	.002	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.6	Pearson Correlation	.482**	.482**	.512**	.266	.529**	1	.302	.257	.037	.614**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.001	.097	.000		.058	.110	.820	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.7	Pearson Correlation	.306	.306	.249	.270	.373*	.302	1	.619**	.305	.611**
	Sig. (2-tailed)	.055	.055	.121	.092	.018	.058		.000	.056	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.8	Pearson Correlation	.282	.282	.575**	.452**	.649**	.257	.619**	1	.504**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.078	.078	.000	.003	.000	.110	.000		.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.9	Pearson Correlation	.236	.236	.171	.360*	.474**	.037	.305	.504**	1	.518**
	Sig. (2-tailed)	.143	.143	.292	.023	.002	.820	.056	.001		.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

X1	Pearson Correlation	.638**	.638**	.761**	.681**	.812**	.614**	.611*	.779**	.518**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Akuntabilitas (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.143	.864**	.245	.720**	.592**	.832**
	Sig. (2-tailed)		.378	.000	.127	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.2	Pearson Correlation	.143	1	.232	.462**	-.042	.253	.513**
	Sig. (2-tailed)	.378		.149	.003	.796	.116	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.3	Pearson Correlation	.864**	.232	1	.337*	.681**	.591**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.149		.033	.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.4	Pearson Correlation	.245	.462**	.337*	1	.174	.384*	.613**
	Sig. (2-tailed)	.127	.003	.033		.282	.014	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.5	Pearson Correlation	.720**	-.042	.681**	.174	1	.363*	.643**
	Sig. (2-tailed)	.000	.796	.000	.282		.021	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2.6	Pearson Correlation	.592**	.253	.591**	.384*	.363*	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.116	.000	.014	.021		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
X2	Pearson Correlation	.832**	.513**	.859**	.613**	.643**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Pengendalian Internal (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.631**	.673**	.512**	.399*	.873**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.011	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X3.2	Pearson Correlation	.631**	1	.543**	.266	.391*	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.097	.013	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X3.3	Pearson Correlation	.673**	.543**	1	.529**	.393*	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.012	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X3.4	Pearson Correlation	.512**	.266	.529**	1	.495**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.001	.097	.000		.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X3.5	Pearson Correlation	.399*	.391*	.393*	.495**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.011	.013	.012	.001		.000
	N	40	40	40	40	40	40
X3	Pearson Correlation	.873**	.767**	.842**	.667**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Partisipasi Masyarakat (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.553**	.583**	.259	.278	.683**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.106	.083	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X4.2	Pearson Correlation	.553**	1	.850**	.468**	.313*	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.049	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X4.3	Pearson Correlation	.583**	.850**	1	.399*	.287	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.011	.073	.000
	N	40	40	40	40	40	40

X4.4	Pearson Correlation	.259	.468**	.399*	1	.764**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.106	.002	.011		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
X4.5	Pearson Correlation	.278	.313*	.287	.764**	1	.628**
	Sig. (2-tailed)	.083	.049	.073	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40
X4	Pearson Correlation	.683**	.887**	.872**	.711**	.628**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.259	.455**	.510**	.737**
	Sig. (2-tailed)		.107	.003	.001	.000
	N	40	40	40	40	40
Y.2	Pearson Correlation	.259	1	.275	.375*	.662**
	Sig. (2-tailed)	.107		.086	.017	.000
	N	40	40	40	40	40
Y.3	Pearson Correlation	.455**	.275	1	.495**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.003	.086		.001	.000
	N	40	40	40	40	40
Y.4	Pearson Correlation	.510**	.375*	.495**	1	.809**
	Sig. (2-tailed)	.001	.017	.001		.000
	N	40	40	40	40	40
Y	Pearson Correlation	.737**	.662**	.746**	.809**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Kompetensi (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.848	9

Variabel Akuntabilitas (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	6

Variabel Pengendalian Internal (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	5

Variabel Partisipasi Masyarakat (X4)

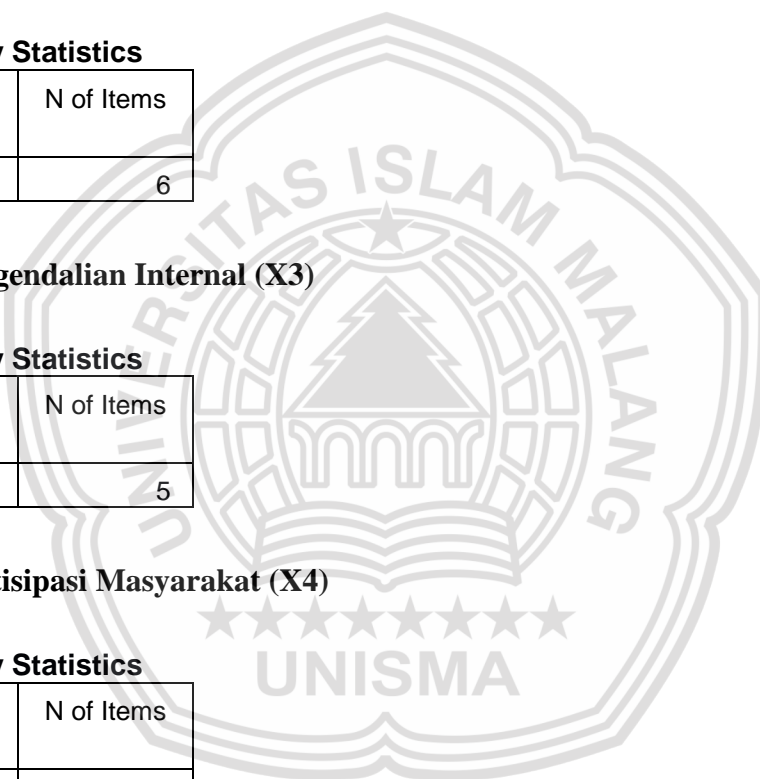
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	5

Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	4



Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46676519
Most Extreme Differences	Absolute	.156
	Positive	.108
	Negative	-.156
Test Statistic		.156
Asymp. Sig. (1-tailed)		.015 ^c
Monte Carlo Sig. (1-tailed)	Sig.	.129 ^d
99% Confidence Interval	Lower Bound	.247
	Upper Bound	.269

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.510	2.435		0.000	1.000		
	X1	.000	.145	.000	.000	1.000	.118	8.453
	X2	.000	.167	.000	.000	1.000	.296	3.382
	X3	.000	.197	.000	.000	1.000	.145	6.889
	X4	.000	.155	.000	.000	1.000	.305	3.276

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.422	1.191		0.355	0.725
	X1	-0.114	0.071	-0.745	-	0.116
	X2	0.018	0.081	0.064	1.613	0.827
	X3	0.151	0.096	0.654	0.220	0.126
	X4	0.075	0.076	0.285	1.567	0.329

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.848	3.010		0.946	0.350
	X1	0.147	0.052	0.265	2.846	0.007
	X2	0.629	0.085	0.085	7.425	0.000
	X3	0.147	0.052	0.288	3.758	0.000
	X4	0.629	0.085	0.305	2.107	0.038

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Simultan (Uji F)

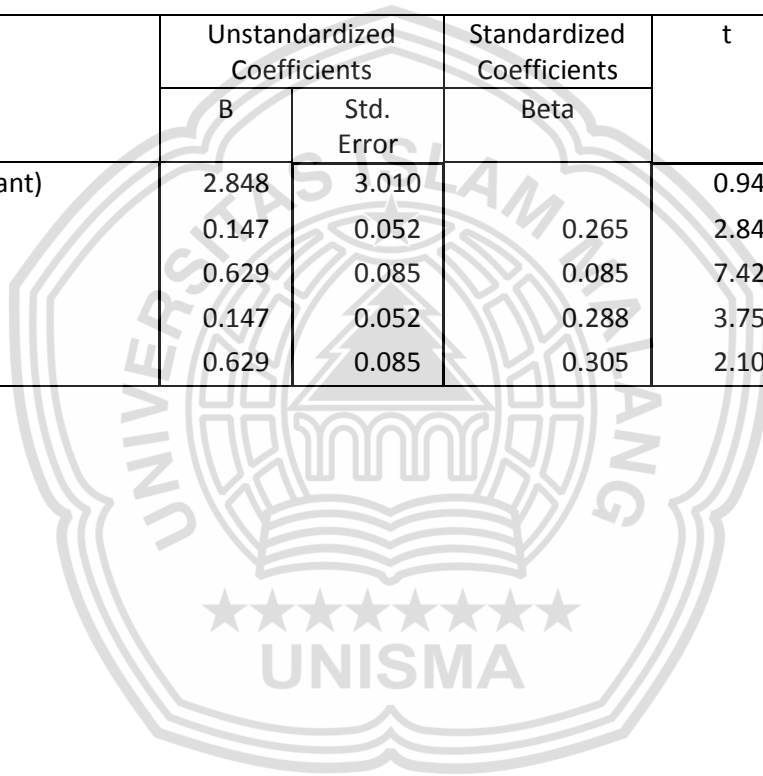
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	142.902	2	71,451	59,667	0
	Residual	49.098	41	1.198		
	Total	192,00	43			

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	0.744	0.732	1.09430

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.848	3.010		0.946	0.350
	X1	0.147	0.052	0.265	2.846	0.007
	X2	0.629	0.085	0.085	7.425	0.000
	X3	0.147	0.052	0.288	3.758	0.000
	X4	0.629	0.085	0.305	2.107	0.038



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang. Alat pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat dijelaskan bahwa apabila kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat pada kantor desa Kebonagung Malang berjalan dengan baik, maka berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka semakin meningkat pula efektivitas dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi suatu unsur penting dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya akuntabilitas sistem

keuangan di setiap desa akan tersusun dengan baik, pengendalian internal berperan penting terhadap pengelolaan dana desa agar anggaran pendapatan dapat dikelola dengan baik, dan partisipasi masyarakat juga membantu dalam perkembangan suatu desa, dengan adanya ide atau dukungan maka dapat memberikan dampak yang positif bagi desa.

5.2 Keterbatasan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu:

1. Tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Kurangnya minat membaca pertanyaan yang telah diberikan
3. Keterlambatan pengumpulan pengisian kuesioner

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menerapkan metode survei melalui kuesioner dengan ditambahkan teknik wawancara secara langsung, agar data dari responden akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan membantu menjelaskan kepada para responden, agar data yang diberikan oleh responden sesuai yang diharapkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan membuat jadwal pertemuan terlebih dahulu dan memberikan *deadline*, agar kuesioner dapat selesai tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Andangatmadja. (2011). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Volume 01, No 1.
- Aryani, D., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(2), 178-190.
- Bastian. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Surabaya: Erlangga.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartami, D. F. (2021). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Kebonsari). (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Ilhami, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 66-79.
- Juniarti, U., Inapty, B. A., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608-620.
- Kumalasari, D. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap

- Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1116-1122.
- Mardiasmo. (2018). *Serial Otonomi Daerah: otonomi manajemen dan keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 118-130.
- Moeheriono, Prof. M.Si, (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi (Edisi Empat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di

- Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183-198.
- Robbins, S. P. (2016). *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi (Edisi Enam Belas)*. Surabaya: Salemba Empat.
- Saputra, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Bantul. (*Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*).
- Saputri, A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kecamatan Mranggen). (*Doctoral Dissertation, Universitas Semarang*).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Waladiyah, U. (2018). Pengaruh Kepatuhan Atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (*Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya*).
- Walyati, F. N. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan). (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang*).